PENDIDIKAN KARAKTER: SUATU TINJAUAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Drs. Miftakhul Anwar, Dip.Ed.

Abstrak

Pendidikan Nasional yang pada hakikatnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ternyata berbanding terbalik dengan berbagai realitas yang ada . Proses pendidikan di samping sebagai transfer pengetahuan seharusnya menjadi alat transformasi nilai-nilai moral dan *character building*. Satuan pendidikan ideal yang bisa memenuhi standar nasional, sekaligus sebagai pelopor pendidikan karakter adalah pesantren. Pesantren yang dimaksud disini adalah pesantren modern, yang tetap mempertahankan sistem *salaf* dan mengkombinasikannya dengan perkembangan global . Pendidikan karakter merupakan sebuah solusi efektif atas berbagai problema dekadensi moral bangsa dewa sa ini. Pendidikan karakter diharapkan menjadi sebuah inovasi untuk mengembalikan "ruh" pendidikan yang selama ini mengalami distorsi dan menciptakan insan akademis yang cerdas intelektual, emosional, dan spritual. Bagaimanapun juga, karakter SDM yang kuat adalah modal peradaban bangsa yang unggul.

Kata Kunci: Pendidikan karakter, pesantren.

Pendahuluan

Maraknya tawuran, kasus *bullying*, dan fenomena kriminalitas di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi, menimbulkan sebuah tanda tanya besar akan realisasi fungsi Pendidikan Nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003. Pendidikan Nasional yang pada hakikatnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ternyata berbanding terbalik dengan berbagai realitas yang ada.

Adalah sebuah ironi, dimana Indonesia selalu menjadi pemborong medali dalam setiap kompetisi olimpiade sains internasional, namun di sisi lain, kasus siswa-siswi cacat moral seperti siswi *married by accident*, aksi pornografi, kasus narkoba, plagiarisme dalam ujian, dan sejenisnya, senantiasa marak menghiasi sejumlah media. Bukan hanya terbatas pada peserta didik, lembaga-lembaga pendidikan maupun instansi pemerintahan yang notabene diduduki oleh orang-orang penyandang gelar akademis, pun tak luput terjangkiti virus dekadensi moral.

Hasil survei *Transparency International* yang merupakan organisasi internasional anti korupsi menyebutkan bahwa kepolisian, peradilan, dan parlemen , masih menududuki skor tertinggi dalam nilai indeks korupsi. Ketiga lembaga tersebut tentunya diduduki oleh orang-orang yang berlatar pendidikan memadai. Senada dengan TI, hasil riset tahun 2004, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan adanya indikasi pola korupsi yang melibatkan kepala sekolah bersama komite sekolah, dan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan.

Penemuan mencengangkan tersebut dapat dianalogikan sebagai sebuah tamparan keras bagi bangsa. Para *stakeholders* dan pendidik yang tadinya diharapkan menjadi *ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* , malah lebih menyuburkan slogan sarkastik: *guru kencing berdiri, murid kencing berlari* .

"Ketidak-sehatan" lingkungan pendidikan inilah yang akhirnya mendorong munculnya tren *homeschooling* dan pendidikan virtual. Model pendidikan baru ini kian membuat sistem pendidikan formal tersisih. Tak sedikit keluarga peserta didik yang lantas mengalihkan anaknya untuk mengikuti program *homeschooling* karena khawatir akan pengaruh lingkungan sekolah yang tak lagi "steril". Penyebab lain, tak jarang peserta didik mengalami

tekanan psikologis di sekolah non-virtual disebabkan interaksi dengan guru yang terlalu kaku dan otoriter, plus tekanan pergaulan antar siswa. Naasnya, pendidikan virtual bukannya memberikan solusi, malah membuat peserta didik semakin tercabut dari persinggungan realitas sosialnya.

Berbagai fenomena di atas menuntut agar sistem pendidikan dikaji ulang. Dalam hal ini, kurikulum sebagai standar pedoman pembelajaran belum sepenuhnya mengejawantahkan tujuan utama pendidikan itu sendiri, yaitu membentuk generasi cerdas komprehensif (IQ, EQ, dan SQ). Oleh karena itu, diperlukan reformasi pendidikan, demi memulihkan kesenjangan ektrim antara kualitas intelektual (IQ) dengan nilai-nilai moral spritual (ESQ).

Pendidikan Karakter

Proses pendidikan di samping sebagai transfer pengetahuan seharusnya menjadi alat transformasi nilai-nilai moral dan *character building*. Semakin terdidik seseorang, secara logis, seharusnya semakin tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang menyimpang, sehingga ilmu dan kualitas akademis yang didapatkan tidak disalah-gunakan.

Pendidikan karakter berupaya menjawab berbagai problema pendidikan dewasa ini. Pendidikan karakter adalah sebuah konsep pendidikan integratif yang tidak hanya bertumpu pada pengembangan kompetisi kognitif peserta didik semata, tetapi juga pada penanaman nilai etika, moral, dan spritual.

Oleh karena itu, demi mewujudkannya, dibutuhkan perencanaan matang dan berjangka panjang. Setidaknya, ada tiga langkah awal yang dapat ditempuh:

1. Rekonstruksi Kurikulum Nasional

Pada dasarnya, penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sudah merupakan inovasi ideal yang dilakukan pemerintah. Namun, kurangnya SDM dan lemahnya kualifikasi guru mengakibatkan penjabaran KTSP masih belum optimal. Masih banyak guru yang memegang filosofis sistem kurikulum lama yang memposisikan peserta didik sebagai objek, bukan sebagai subjek aktif pembelajaran. Ditambah lagi, misinterpretasi terhadap KTSP yang membentuk sebuah paradigma bahwa lembaga akademik sebagai penerima pasif kebijakan pemerintah. Padahal, desentralisasi pendidikan telah memberi ruang seluas-luasnya bagi setiap jenjang pendidikan untuk memilih sistem pembelajaran kreatif-inovatif, sehingga tujuan pendidikan nasional bisa terealisasi dengan benar.

Di lingkup *stakeholders*, dalam hal ini Depdiknas dan instansi terkait, juga tak luput dari masalah. Tak sedikit kebijakan pemerintah yang terkesan "menyimpang" dan berbanding terbalik dengan teori yang ditetapkan dalam kurikulum.

Contoh kecilnya, dalam KTSP, sistem penilaian yang diterapkan adalah sistem penilaian berkelanjutan yang meliputi tiga aspek yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Namun, kebijakan Ujian Nasional yang ditetapkan pemerintah, terkesan menganak-tirikan aspek afektif dan psikomotorik dengan mematok kelulusun melalui tiga mata pelajaran utama yang lebih bertumpu pada kompetensi kognitif.

Selain itu, penekanan kompetensi kelulusan yang terbatas pada tiga mata ujian tersebut, dianggap kontraproduktif terhadap pengembangan karakter siswa. Siswa tak lagi melihat ujian sebagai ujian ketangguhan mental, akan tetapi lebih cenderung sebagai momok yang mematikan kreativitas siswa itu sendiri.

Untuk itulah, diperlukan sebuah upaya serentak, konstruktif, dan menyeluruh untuk merekonstruksi kurikulum nasional melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Sosialisasi KTSP yang maksimal dan menyeluruh melalui berbagai pelatihan agar guru dan sekolah "siap" menjabarkan KTSP secara kreatif. Sosialisasi juga perlu diadakan di setiap sub-lembaga di bawah Depdiknas, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar

penerap kebijakan kurikulum itu sendiri. Sosialisasi tersebut dibarengi dengan adanya evaluasi berkelanjutan, sehingga konsep kurikulum bisa teralisasi secara merata di setiap jenjang pendidikan.

b. Penambahan jam pembelajaran pada materi yang mendukung *character building* seperti PPKN dan pelajaran agama dengan mengurangi proses pembelajaran teoritis. Fakta yang terjadi di lapangan, justru dua materi ini hanya diberlakukan sebanyak satu kali pertemuan setiap minggu selama 2 jam pembelajaran, ditambah lagi, materi tersebut hanya sebatas transfer pengetahuan teknis, tanpa menyentuh titik sentral moralitas siswa. Siswa seharusnya aktif berdiskusi masalah-masalah sosial yg terjadi dan mendapatkan suntikan motivasi untuk menjadi manusia berkarakter. Sedikit berbeda dengan yang terjadi di tingkat perguruan tinggi, materi *character building* bahkan telah diterapkan di beberapa universitas swasta seperti di Universitas Bina Nusantara. Sebuah langkah inovatif yang pantas dicontoh oleh perguruan tinggi lainnya.

c. Sistem evaluasi akhir yang berbasis kompetensi ESQ. Evaluasi hendaknya tidak sebatas ujian tertulis semata, akan tetapi, perilaku dan etika keseharian seharusnya menjadi tolak ukur lulus-tidak lulusnya seorang peserta didik. Untuk itu, model Ujian Nasional perlu ditinjau ulang, sehingga alumni pendidikan tidak hanya berkompetensi dalam intelektualitas saja, tetapi juga kualitas karakter diri yang meliputi nilai moral dan spritual. Selain UN, evaluasi belajar lainnya seperti tes semester, ulangan harian, tidak ditekankan pada penilaian hasil jawaban di atas kertas saja, melainkan juga pada sikap peserta didik selama proses pembelajaran seperti tingkat absensi di kelas, mental anti-menyontek selama ujian, dan sikap moral-spritual lainnya.

2. Optimalisasi Nilai ESQ dalam Komunitas Pendidikan

Di Jepang, nilai-nilai moral-spritual tidaklah diajarkan dalam satu bentuk mata pelajaran khusus, akan tetapi diintegrasikan ke dalam semua materi ajar apapun, termasuk materi sains. Menariknya lagi, meski norma-norma masyarakat Jepang erat kaitannya dengan agama Shinto atau Budha, namun pelajaran agama tidak didapati di sekolah-sekolah formal Jepang. Nilai-nilai agama maupun moral diterapkan dalam perilaku sehari-hari di setiap jenjang pendidikan, terutama di pendidikan dasar. Sistem pendidikan seperti ini dikenal dengan sebutan *doutokukyouiku*.

Menurut Mendiknas Muhammad Nuh, pendidikan tidak cukup jika diajarkan melalui kurikulum. Untuk menanamkan nilai-nilai luhur, pendidikan harus membentuk sebuah tradisi dan budaya yang kelak menjadi bibit-bibit peradaban. Kebiasaan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti budaya membuang sampah pada tempatnya, budaya pergaulan, dan sebagainya seperti yang berlaku di Jepang.

Optimalisasi nilai-nilai moral-spritual (ESQ) ke dalam budaya edukatif sangat urgen untuk mengatasi ketimpangan antara kualitas kognisi dengan aspek non-kognisi yang selama ini masih berlaku dalam sistem pembelajaran di Indonesia. Pembentukan budaya tersebut tentu harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua unsur yang berada dalam komunitas edukatif, meliputi pendidik (guru, kepala sekolah, dosen, maupun tenaga pengajar lainnya), komite sekolah, peserta didik, dan staf/karyawan biasa.

Beberapa agenda awal yang bisa dibentuk sebagai sebuah budaya dalam komunitas edukatif, diantaranya:

a. Mengintegrasikan pendidikan ESQ ke semua materi pembelajaran termasuk pelajaran sains, sehingga tidak berpusat pada aspek kognitif saja. Misalnya, penanaman motivasi untuk melestarikan bumi atau hikmah penciptaan semesta melalui pelajaran Biologi.

b. Perubahan paradigma "Siswa Teladan". Jika selama ini pemilihan siswa teladan berangkat pada penilaian *cognitive-based competition* semata, sudah saatnya paradigma itu dihapuskan. Siswa teladan bukan saja siswa yang berprestasi dalam hal "juara kelas" dan semisalnya, akan tetapi, siswa yang berkarakter mandiri, taqwa, peka sosial, seharusnya mendapat apresiasi dan penilaian lebih.
c. Pembenahan lingkungan belajar. Lingkungan yang sehat bukan saja memberikan stimulasi positif bagi proses transfer pengetahuan, tetapi juga memudahkan optimalisasi nilai-nilai luhur dalam lingkup pendidikan. Lingkungan sehat dapat dibentuk melalui budaya yang sehat pula. Seperti budaya sekolah anti-rokok, terlebih dahulu dimulai dari guru dan karyawan sebagai sosok teladan, lalu diikuti oleh semua unsur-unsur akademik.
d. Mengembalikan fungsi fasilitas ibadah di lingkup akademik. Musallah sekolah misalnya, dihidupkan kembali dengan budaya shalat berjamaah oleh segenap masyarakat sekolah, sehingga pelajaran agama tidak sekedar bernilai teoritis.
e. Apresiasi pemerintah terhadap setiap jenjang pendidikan yang berhasil menerapkan pendidikan berbasis kecerdasan komprehensif ini dengan memberikan penghargaan, hingga bantuan beasiswa bagi guru yang ingin meningkatkan kualitas akademiknya.

3. Pesantren Sebagai Model Percontohan

Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan undang-undang terkait konsep satuan pendidikan ideal, Depdiknas dengan program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Standar Nasional (RSSN/RSSN) dan Depag melalui program Madrasah Modelnya-akan tetapi masih banyak komunitas edukatif yang kebingungan dalam hal penerapan di lapangan.

Hal ini terjadi karena pemerintah tidak menetapkan sebuah model satuan pendidikan ideal yang jelas dan konkret dan hanya sebatas konsep teoritis abstrak, sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi.

Menurut penulis, satuan pendidikan ideal yang bisa memenuhi standar nasional, sekaligus sebagai pelopor pendidikan karakter adalah pesantren. Pesantren yang dimaksud disini adalah pesantren modern, yang tetap mempertahankan sistem *salaf* dan mengkombinasikannya dengan perkembangan global.

Dewasa ini, pesantren modern telah banyak berbenah dan berkembang dengan pesatnya. Berdasarkan data dari Departemen Agama, di tahun 2008 saja terdapat 21521 pesantren yang tersebar di tanah air, dengan 9639 pesantren bercorak kombinasi. Angka ini menjadi sebuah bukti bahwa pesantren seharusnya sudah dapat diberdayakan secara optimal, terutama dalam mencetak generasi SDM yang berkarakter cerdas komprehensif.

Beberapa nilai plus pesantren yang tidak dimiliki pendidikan konvensional, antara lain:

Pertama, di pesantren, ilmu-ilmu transedental tetap menjadi prioritas, namun pesantren juga tetap membuka kelas bahasa asing, kelas IPTEK, dan fasilitas lain pendukung kompetensi kognisi.

Pesantren Mahasiswa (Pesma) SDM IPTEK di Tegal Jawa Timur misalnya, memberikan sebuah angin segar baru dalam inovasi pendidikan. Di pesantren ini, mahasiswa tidak hanya digenjot dengan berbagai pengajian agama dan pembinaan mental, tetapi juga penguasaan IPTEK melalui program *technopreneurship*. Di satu sisi, santri boleh memilih universitas berkualitas manapun di luar pesantren sambil tetap *mondok* dan bersedia mematuhi segala norma yang ditetapkan di pesantren.

Kedua, budaya *mondok* di asrama, membantu internalisasi nilai-nilai ESQ ke semua lapisan di lingkup pesantren. Di asrama, siapapun mendapatkan perlakuan yang sama, posisi guru dan murid sejajar dalam kewajiban menaati etika yang sudah ditetapkan. Bagaimanapun juga, pembentukan karakter membutuhkan pembentukan kebiasaan, dan kebiasaan ini akan

lebih optimal jika proses pendidikan diterapkan secara kontinyu sebagaimana dalam sistem *mondok* pesantren.

Ketiga, di pesantren, keteladanan seorang pendidik adalah sebuah keniscayaan, sehingga membantu internalisasi nilai-nilai ESQ secara alami kepada seluruh peserta didik. Tidak diprioritaskan pendidik yang cerdas IQ, tetapi pendidik yang *capable* dalam ilmu-ilmu agama dan memiliki kualitas moral yang baik sudah memenuhi kualifikasi sebaga i seorang guru di pesantren.

Sebaliknya, pada pendidikan non-pesantren, seorang guru cukup dengan berbekal ijazah "PNS" dan *embel-embel* gelar akademik, sudah bisa dianggap layak menjadi seorang pendidik, dan kualitas ESQ dinomorduakan. Tak heran, jika m asih saja terjadi kasus pelecehan seksual seorang guru terhadap muridnya, dan model kriminalitas lainnya.

Keempat, pesantren lebih bersifat ekonomis. Biaya masuk di pesantren modern relatif lebih murah dibanding dengan sekolah-sekolah konvensional yang berasrama lainnya. Salah satu penyebabnya adalah karena di pesantren menerapkan tradisi hidup sederhana dan bekerjasama dengan masyarakat sekitar pesantren.

Kelima, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di tanah air yang memiliki berbagai karakteristik dan corak kultural khas. Penetapan pesantren sebagai model percontohan pendidikan yang ideal dan mensejajarkannya dengan lembaga-lembaga pendidikan lain merupakan salah bentuk pelestarian akan warisan budaya Indonesia.

Berbekal nilai plus tersebut, pesantren diharapkan mampu menelurkan bibit-bibit akademis berkarakter saleh, berakhlak mulia, memiliki kualitas ilmu agama, sekaligus berkompeten dalam bidang IPTEK. Pemerintah sebagai motivator dan fasilitator, hendaknya memberikan dukungan penuh terhadap model pesantren inovatif melalui berbagai apresiasi berikut:

a. Pemberian status akreditasi yang jelas dan penyetaraan ijazah, sebagai bukti pengakuan pemerintah dan masyarakat terhadap pesantren yang selama ini terkesan dianak-tirikan.
b. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana IPTEK, terutama pesantren-pesantren di wilayah terpencil agar mampu bersaing dalam kualitas intelektual. Di satu sisi, dengan adanya bantuan pemerintah, pesantren tidak perlu lagi menaikkan biaya operasional sehingga tetap menjadi lembaga pendidikan murah dan dapat diakses lapisan masyarakat manapun.
c. Penghargaan terhadap tenaga pengajar pesantren yang menerapkan pendidikan berbasis karakter, misalnya memperhatikan gaji minim guru/ustaz yang disebabkan oleh modal pendanaan pesantren yang tidak sebesar pendidikan konvensional.
d. Penetapan sebuah pesantren sebagai model sekolah berstandar nasional yang ideal, baik melalui peraturan pemerintah, maupun dengan perantara publikasi massal.

Penutup

Pendidikan karakter merupakan sebuah solusi efektif atas berbagai problema dekadensi moral bangsa dewasa ini. Pendidikan karakter diharapkan menjadi sebuah inovasi untuk mengembalikan "ruh" pendidikan yang selama ini mengalami distorsi dan menciptakan insan akademis yang cerdas intelektual, emosional, dan spritual. Bagaimanapun juga, karakter SDM yang kuat adalah modal peradaban bangsa yang unggul.

Namun, dibutuhkan kesadaran kolektif dan gerakan nasional serempak, agar spirit pendidikan yang selama ini terserabut bisa diutuhkan kembali. Rekonstruksi kurikulum nasional, optimalisasi nilai-nilai ESQ dalam komunitas pendidikan, serta penetapan pesantren sebagai model percontohan satuan pendidikan ideal, dapat terwujud jika pemerintah mau menjadi sosok terdepan. Tentunya bukan sebatas pemerintah, baik individu, keluarga, pakar

akademik, maupun seluruh komunitas pendidikan diharapkan bers atu-padu dan berpartisipasi aktif mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

REFERENSI:

Aan Hasanah. *Pendidikan Berbasis Karakter*. http://www.mediaindonesia.com/read/2009/12/14/111318/68/11/Pendidikan-Berbasis-Karakter

Arief Furchan. *Peningkatan Pendidikan Madrasah Melalui Madrasah Model: Peran Pejabat Kantor Depag*. http://www.pendidikanislam.net/index.php/makalah/41-makalah-tertulis/266-madrasah-model

Departemen Agama. *Jumlah Pesantren Menurut Jenis Penyelenggaraannya Tahun Akademik 2008* (pdf). http://www.depag.go.id/file/dokumen/Data0859.pdf

Departemen Pendidikan Nasional. *Sistem Penilaian KTSP*. http://www.scribd.com/doc/4163440/Sistem-Penilaian-KTSP

Deri Suyatma. *Antara KBK dengan KTSP*. http://mtsnurulazhar.wordpress.com/2008/07/17/antara-kbk-dengan-ktsp/

Erry Utomo. *Curriculum Policy in Indonesia* (pdf). http://www.bppiindonesianheritage.org/download/

Goze Isno. *ESQ: Terobosan Baru dalam Pendidikan Agama Islam*. http://isnoe82.blogspot.com/2009/03/esq-terobosan-baru-dalam-pendidikan.html

Imam Hanafi. *Plus Minus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. http://re-searchengines.com/imamhanafie3-07-2.html

Louise Blair. *Kehidupan di Sebuah Ponpes di Jawa Timur*. http://www.docstoc.com/docs/20098159/Kehidupan-di-sebuah-PonPes-%28Pondok-Pesantren%29-Jawa-Timur/

Marsaja. *Konsep Sekolah Berbasis Karakter*. http://marsaja.wordpress.com/2008/03/31/konsep-sekolah-berbasis-karakter/

Mohammad Nuh. *Sambutan Mendiknas pada Peringatan Hardiknas 2 Mei 2010* (pdf). http://www.depdiknas.go.id/

Murni Ramli. *Pendidikan Moral Ala Jepang*. http://keyanaku.blogspot.com/2008/10/pendidikan-moral-ala-jepang.html

Soripada. *Konsep Sekolah Model dan Instrumen Verifikasi Sekolah Model SMA.* http://www.psb-psma.org/content/berita/konsep-sekolah-model-dan-intrumen-verifikasi-sekolah-model-sma

UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (pdf). http://www.depdiknas.go.id/produk_hukum/uu/uu_20_2003.pdf

ICW: Kepala Sekolah Rawan Korupsi. http://antikorupsi.org/indo/content/view/2749/2/

Komnas Perlindungan Anak Minta Depdiknas Sikapi Kasus Bullying. http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2009/11/22/brk,20091122-209789,id.html

Lagi, Santri Pesantren Mahasiswa SDM Iptek Mengukir Prestasi. http://sdm-iptek.org/web/lagi-santri-pesantren-mahasiswa-sdm-iptek-mengukir-prestasi

Mendiknas: Pendidikan Karakter Mendesak Diterapkan. http://www.diknas.go.id/headline.php?id=1416

Polisi, Parpol, Parlemen, dan Peradilan Dianggap Paling Terpengaruh Korupsi. http://www.ti.or.id/researchsurvey/90/tahun/2007/bulan/12/tanggal/06/id/3473/

Prestasi Santri dan Murid Madrasah Meningkat Signifikan. Buletin Ikhlas Beramal No. 57 Tahun XII Juni 2009. http://www.scribd.com/doc/24613026/Depag-LaporanKhusus-Prestasi-Santri-dan-Murid-Madrasah-Meningkat-Signifikan